

**ANALISIS PENGARUH PERILAKU
PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Stevanus Tri Anggoro

NIM. 12030111130051

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Stevanus Tri Anggoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130051

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERILAKU
PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN DENGAN
TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Dosen Pembimbing : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 3 Agustus 2015

Dosen Pembimbing

Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19790924 200812 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Stevanus Tri Anggoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130051

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERILAKU
PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN DENGAN
TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Agustus 2015

Tim Penguji:

1. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Anis Chariri, SE, MCom, Ph.D. Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Stevanus Tri Anggoro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,

Stevanus Tri Anggoro

NIM. 12030111130051

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of tax avoidance behavior on firm value by considering transparency as a moderating variable. Tax avoidance as an independent variable is measured by book-tax-difference (BTD) value. Firm value and agency cost as dependent variables are measured by Tobin's q and STA value. Transparency as a moderating variable is measured by the ratio that takes into account items contained in financial statements under the provisions of GCG self-assessment in 2010. This research uses leverage as a control variable.

The sample of this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2013. The sampling method in this research is purposive sampling. The analysis technique in this study uses multiple regression analysis.

Overall, the results show that tax avoidance behavior has significant positive effects on firm value. Tax avoidance has positive effects on agency cost. And transparency can moderate the effect of tax avoidance on firm value.

Keywords: Tax avoidance, firm value, agency cost, transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan transparansi sebagai variabel moderating. Penghindaran pajak sebagai variabel independen diukur menggunakan nilai *book-tax-difference* (BTD). Nilai perusahaan dan biaya agensi berperan sebagai variabel dependen yang masing-masing diukur dengan nilai *Tobins q* dan *STA*. Transparansi berperan sebagai variabel moderating yang diukur dengan rasio yang memperhitungkan item yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam *Self Assessment GCG* tahun 2010. Penelitian ini menggunakan leverage sebagai variabel kontrol.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya agensi. Dan transparansi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, nilai perusahaan, biaya agensi, transparansi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Yang menjadikan kita kaya sebenarnya bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain

(Anonymous)

Bahwa perbedaan tidak hanya merupakan pilihan, tetapi juga keadaan yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan urusan kita membuat seisi bumi menjadi seragam.

(Pandji Pragiwaksono)

Impian ada di tengah peluh, selalu menunggu agar ia mengucur

(JKT48)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Keluarga tercinta di rumah
dan seluruh teman dan sahabat-sahabatku
Keluarga Besar Akuntansi Undip

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)”** .

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan skripsi ini tentunya mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, tanpa bantuan mereka penulis hanya akan menghabiskan waktu seperti singa masai dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan berbagai masukan dan nasihat kepada penulis
4. Prof. Drs.H Arifin Sabeni, Mcom., Hons, Ph.D., Akt. (alm) dan Dr.H. Raharja, M.si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama proses perwalian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Robertus Mardiman dan Ibu CH. Ngatijem serta kakak-kakak saya Prapti dan Supri, yang senantiasa memberikan doa, pengertian, masukan, dan dukungan bagi penulis.
8. Sahabat-sahabatku Albertus Bayu, Rusdan Radifan, dan Gregorius Satrio yang telah memberikan canda tawa, dukungan dan segala bentuk bantuan yang sangat berarti dalam masa perkuliahan.
9. Teman-teman BarengTerusSaklawase (Tinus, Cicil, Nceng, Peter, Tito, Hayuning, Yoshi, Anggoro, Agus, Nita) yang selalu memberikan kegembiraan dan keceriaan dari masa SMA.
10. Teman-teman pemberi masukan, Anggraini Dwi Nastiti, Cintya Wulandari, Kristantina Wahyu Prasiwi, Anastasia Liliana, Amalia Nurul Iman, Amalia Muslimawati. Terimakasih atas segala bimbingan, masukan dan arahan tulus untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Bukan Sapari Boys yang telah memberikan tempat berbagi canda tawa selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman PRMK FEB, yang selalu menjadi tempat terbaik untuk berbagi canda tawa dan cerita antar saudara seiman.
13. Teman-teman DNT, Echi, Padang, Ova, Nur, serta karyawan-karyawati PT. Dinustech. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bekerja, belajar, serta bercanda tawa bersama.
14. Teman-teman akuntansi 2011 yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis. Terimakasih atas semua kebersamaan, suka duka, canda dan tawa yang telah kita jalin selama ini.
15. Seluruh pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Semarang, 26 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Teori Sinyal.....	16
2.1.3 Pajak.....	17
2.1.3.1 Manajemen Pajak.....	20
2.1.3.2 Perencanaan Pajak.....	23
2.1.3.3 Penghindaran Pajak.....	24
2.1.4 Biaya Agensi.....	26
2.1.5 Nilai Perusahaan.....	27
2.1.6 Transparansi.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
2.3.1 Perumusan Hipotesis.....	32
2.3.1.1 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.....	32
2.3.1.2 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Biaya Agensi.....	33
2.3.1.3 Transparansi Memoderasi Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	36
3.1.1 Variabel Independen.....	36
3.1.2 Variabel Dependensi.....	37
3.1.3 Variabel Moderating.....	38
3.1.4 Variabel Kontrol.....	39

3.2 Populasi dan Sampel.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5 Metode Analisis.....	41
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	41
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	41
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	42
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	43
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.3 Analisis Regresi.....	45
3.5.4 Uji Hipotesis.....	46
3.5.4.1 Uji Signifikansi (Uji Statistik) F.....	46
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.5.4.3 Uji Statistik t.....	47
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2 Metode Analisis.....	50
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	57
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	58
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	60

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	63
4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	64
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65
4.2.3.3 Uji Statistik t.....	66
4.3 Interpretasi Hasil.....	70
2.3.1.1 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.....	71
2.3.1.2 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Biaya Agensi.....	72
2.3.1.3 Transparansi Memoderasi Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan.....	75
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Autokorelasi.....	44
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	50
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test I NS Tobins.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test II STA.....	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Run Test.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	65
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t Model I.....	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t Model II.....	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t Model III.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoretis.....	31
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas I Ns Tobins.....	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas II STA.....	56
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot I.....	61
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot II.....	62
Gambar 4.5 Grafik Scatterplot III.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN.....	80
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF.....	81
LAMPIRAN C HASIL UJI ASUMSI KLASIK.....	82
LAMPIRAN D HASIL ANALISIS REGRESI.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 disebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” Hal tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran baik yang sifatnya rutin maupun untuk pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan (*www.pajak.go.id*).

Banyak usaha dari pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut seperti pembaharuan peraturan perpajakan misalnya untuk pajak penghasilan badan usaha, telah melakukan beberapa pembaharuan tarif, yaitu pada UU No. 7 Tahun 1983, setelah itu ada UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, serta perubahan yang terakhir yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Usaha-usaha perbaharuan tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, dari ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya. Dalam situs resmi Direktorat Jendral Pajak

(*www.pajak.go.id*) dijelaskan bahwa pada tahun 2014 ini, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar RP 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibanding dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.667,1 triliun. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jendral Pajak telah menyusun langkah optimalisasi pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis.

Kegiatan reformasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak memang sebuah kegiatan yang baik, namun bagi perusahaan, kegiatan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tentunya akan berpotensi untuk menambah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga akan menambah unsur pengurang dari laba perusahaan yang sudah dicapai oleh manajer. Bagi perusahaan, membayar pajak memang merupakan sebuah kewajiban, tetapi dari sudut pandang manajemen, pajak dapat berdampak pada keuangan perusahaan salah satunya dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan, akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan yang bersifat meminimalkan pajak, salah satunya adalah manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2003), manajemen pajak adalah Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Hernanto (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah

salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Tujuan dari adanya *Tax Planning* ini adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang terhutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Salah satu bentuk *tax planning* adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Penghindaran pajak perusahaan telah menjadi sorotan sejak 25 tahun terakhir, pada tahun 1986 dalam sejarah Amerika Serikat ditemukan bukti penghindaran pajak yang menyebabkan terjadinya reformasi. Dyreng et. Al, (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan segala kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Pada praktiknya, penghindaran pajak merupakan kegiatan pemanfaatan kelemahan-kelemahan hukum pajak tanpa melanggar hukum perpajakan yang ada. Secara tradisional, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diartikan juga sebagai perpindahan kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan, yang nantinya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan tentunya dengan cara mengurangi pajak perusahaan namun dengan cara-cara yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan berdampak pada nilai perusahaan tersebut. Menurut Fama dan French (1998) Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai

perusahaan, dimana salah satu keputusan manajer yang menyangkut hal ini adalah perilaku penghindaran pajak.

Namun dalam praktiknya, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Chen (2013) menyebutkan bahwa tidak bisa dipungkiri, praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan tersebut, akan ada biaya-biaya lain yang akan berpotensi muncul dimana biaya tersebut bersifat penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain yang muncul dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial, ataupun biaya dari kehilangan reputasi. Manajer tentunya mengetahui besarnya potensi biaya yang akan dikeluarkan, sehingga dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer seharusnya memperhitungkan antara potensi biaya yang muncul dengan manfaat yang dihasilkan, apakah manfaat yang dihasilkan akan lebih banyak dari biayanya, ataukah biaya akan lebih besar daripada manfaat yang dirasakan oleh perusahaan.

Perilaku penghindaran pajak juga dapat meningkatkan perilaku oportunistik dari seorang manajer perusahaan, dimana manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kepentingan yang dia inginkan namun dengan mengorbankan kepentingan dari investor. Resiko dari perilaku oportunistik

manajer tersebut tentunya akan meningkatkan biaya agensi yang dikeluarkan oleh pihak investor sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya-biaya tersebut memiliki peran sebagai upaya pengendalian dari pihak investor terhadap perilaku oportunistik manajer mereka.

Perilaku penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemegang saham. Perilaku penghindaran pajak tentunya bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan, dengan kegiatan tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan di mata para investor. Para manajer tentunya memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan transparansi atas laporan keuangan yang mereka sajikan kepada investor. Wang (2010) menjelaskan bahwa transparansi perusahaan yang didefinisikan sebagai ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar, mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi dapat meningkatkan ketepatan informasi publik yang tersedia untuk investasi, dan untuk keputusan manajemen. Bushman dan Smith (2001,2013) berpendapat bahwa transparansi perusahaan dapat mengurangi resiko investor untuk menarik kembali investasinya terhadap perusahaan. Sehingga dengan meningkatkan tingkat transparansi dari laporan tahunan perusahaan yang

akan diberikan kepada investor, seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan oleh perusahaan atas keputusan investasi dari investor.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Beliau menyebutkan hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (www.pajak.go.id). Pendapat dari mantan Menteri Keuangan tersebut mempertegas bahwa perilaku penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur merupakan sampel yang cocok untuk diteliti, karena pada sektor manufaktur terdapat banyak perusahaan multinasional yang berada didalamnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhang *et al.*, (2009), ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara transparansi informasi dan nilai perusahaan. Transparansi informasi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi mengenai perusahaan bagi para pengguna publik, dapat juga berfungsi sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (Armstrong, Guay, & Weber, 2010). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi informasi dapat secara langsung berkontribusi pada kinerja ekonomi dengan mendisiplinkan karyawan dalam perusahaan dalam pemilihan investasi yang lebih baik, manajemen asset yang lebih efisien, dan mengurangi pengambil alihan kekayaan pemegang saham minoritas (Bushman & Smith, 2003). Pembuatan keputusan bisnis tergantung pada kualitas dan kuantitas informasi. Transparansi informasi dapat mempengaruhi arus kas saat ini dan arus

kas masa depan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan manajemen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang (2010), yang menemukan bahwa perusahaan dengan transparansi informasi yang baik akan melakukan penghindaran pajak.

Transparansi merupakan salah satu kriteria *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan memiliki sebuah kewajiban dimana perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi mengenai tata kelola perusahaan mereka, sehingga investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut baik atau buruk. Keterbukaan informasi mengenai tata kelola perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al*, (2013) yang membahas mengenai penghindaran pajak di negara Cina. Dalam penelitiannya, Chen menggunakan transparansi sebagai variabel moderator antara hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Hasilnya menyebutkan bahwa di negara Cina, praktik penghindaran pajak memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan secara keseluruhan. Para investor di Cina tidak memberikan nilai tambah terhadap praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, peran transparansi sebagai variabel moderator dapat menurunkan dampak negatif yang dihasilkan dari praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut menjadi alasan mengapa penelitian dari Chen *et al* (2013) ini perlu di kembangkan, fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah reaksi investor di Indonesia tentunya di sektor manufaktur memiliki keputusan yang

sama dengan investor di China dengan tidak memberikan nilai tambah terhadap praktik dari penghindaran pajak, dan melihat apakah peran dari variabel moderating yaitu transparansi dapat memperkuat hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik agensi merupakan masalah utama yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Antara perusahaan dengan investor memiliki sudut pandang maupun pendapat yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Perusahaan melihat perilaku penghindaran pajak sebagai sebuah strategi untuk mengurangi beban pajak yang mereka miliki. Melihat dari sudut pandang investor, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dapat mengurangi kandungan informasi dari laporan keuangan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

Konflik agensi yang timbul mengakibatkan beberapa biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh prinsipal (investor) ataupun oleh agen (perusahaan), biaya-biaya tersebut antara lain biaya *monitoring* oleh investor, biaya *bonding* oleh perusahaan serta *residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya hubungan keagenan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak mempengaruhi adanya biaya agensi yang akan dikeluarkan oleh investor dan perusahaan.

Hubungan keagenan yang terjadi mendorong perusahaan untuk lebih terbuka kepada pihak investor. Keterbukaan itu mendorong perusahaan untuk

menyajikan informasi yang lebih lengkap kepada pihak eksternal. Transparansi dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih lengkap kepada pihak eksternal perusahaan. Secara teoritis, laporan keuangan yang lebih transparan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi pokok perhatian dari penelitian ini adalah:

1. Apakah perilaku penghindaran pajak dapat mempengaruhi nilai perusahaan?
2. Apakah perilaku penghindaran pajak dapat mempengaruhi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan?
3. Apakah transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan di Indonesia dengan memperhitungkan transparansi sebagai variabel moderator.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat di menjadi literatur bagi perusahaan, karena dalam penelitian ini menyajikan bukti empiris bagaimana reaksi investor Indonesia terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi beberapa bagian yaitu latar belakang yang menjelaskan secara kontekstual isu yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang timbul dari isu, tujuan penelitian yang berisi apa yang akan dicapai pada penelitian ini, serta manfaat yang yang nantinya akan dihasilkan oleh penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, telaah riset sebelumnya, penjelasan hipotesis serta kerangka penelitian yang ditumuskan untuk melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi penjelasan mengenai populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang menyajikan apa yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menginterpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan antara kepemilikan (pihak prinsipal/investor) dan pengendalian (manajer). Investor memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan *returns* antara manajer dengan investor.

Dari asumsi yang dibangun oleh teori ini, terlihat bahwa dari hubungan agen dengan prinsipal yang terjadi mengakibatkan salah satu pihak memiliki pemikiran negatif bahwa pihak lain akan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan demi diri mereka sendiri atas hubungan kerjasama yang dibuat. Pihak agen memanfaatkan kesempatan, dan dalam hubungan pemegang saham dengan pemberi pinjaman, pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut. Posisi manajemen sangat dominan dalam

suatu perusahaan, hal tersebut membuat manajemen sering keluar dari batas yang ditentukan dan melupakan kewajibannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. (*the agent will not always act in the best interests of the principal*).

Jensen dan Meckling (1976) membagi teori keagenan ini kedalam dua aliran, meliputi: (1) *Positive Theory of Agency*, fokus pada teori ini adalah untuk mengidentifikasi situasi ketika pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen mengalami konflik dalam mekanisme pemerintah yang membatasi *self saving* dalam diri agen. (2) *Prinsipal Agen Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen.

Dalam hubungan antar prinsipal dan agen ini, terdapat kerugian agensi yang harus ditanggung oleh prinsipal. Adanya kerugian agensi, dapat berpotensi mengurangi tingkat pengembalian prinsipal sehingga prinsipal mencoba mengawasi perusahaan secara langsung (Jensen dan Meckling, 1976). Laporan tahunan dan laporan audit dapat digunakan sebagai sarana untuk memonitor pekerjaan manajer. Walaupun demikian, rekening-rekening tersebut dihasilkan oleh para manajer yang mempunyai informasi lebih dibandingkan para pemegang saham atau auditor. Para manajer mungkin menolak untuk mengungkapkan informasi pribadi karena mereka merasa takut jika informasi tersebut dapat digunakan untuk melawan mereka, karena sifat protektif manajer tersebut penyimpangan tidak mungkin dideteksi atau dilaporkan kepada pemegang saham

assymmetric information pun terjadi. Selain itu monitoring dapat menimbulkan biaya yang mana pemegang saham mungkin menolak untuk menanggungnya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *assymmetric information*, yaitu : *adverse selection*, adalah suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral Hazard*, adalah permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *prinsipal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan

spesifikasi-spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dan investor. Namun, kontrak yang lengkap akan sulit diwujudkan. Dengan demikian, investor diharuskan memberikan hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat dari kontrak.

Dari penjelasan-penjelasan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dapat diperoleh bahwa teori agensi memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya konflik agensi, yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya dalam mengorbankan kepentingan pemegang saham.
2. Adanya masalah agensi, masalah yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan *bias* informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori Sinyal menurut Wolk (2006 ; 4), menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal karena terdapat asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (*principal*) dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Teori sinyal ini mengacu kepada salah satu prinsip dari *good corporate governance* seperti yang dijelaskan KNKG (2006) mengenai transparansi. Transparansi adalah kondisi dimana perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimenerti oleh para *stakeholder*. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diperintahkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap diperlukan oleh pemegang saham, kreditor, dan *stakeholder* lain untuk pengambilan keputusan.

Menurut Wang (2010) transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi spesifik dari perusahaan kepada *stakeholder* eksternal yang nantinya akan berdampak kepada nilai perusahaan. Laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan ketersediaan informasi bagi publik mengenai investasi manajemen dan keputusan operasional, untuk pihak eksternal transparansi dapat digunakan untuk memonitor perilaku manajemen. Menurut Bushman dan Smith (2001, 2003) transparansi perusahaan dapat mengurangi *risk premium* yang berhubungan dengan keputusan potensi *shareholder* terhadap manajer yang oportunistik.

Dengan adanya teori sinyal ini, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen perusahaan khususnya perusahaan yang telah *go public* pastinya menyajikan informasi kepada investor agar investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan dapat memprediksi bagaimana prospek perusahaan di masa depan, dan bagi pihak manajemen, praktik penghindaran pajak yang mereka lakukan akan memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan.

2.1.3 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, “...*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat...*”. Soemitro menambahkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat ditemukan karakteristik-karakteristik yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak ada kontrapestasi individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila pemasukan pajak masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *publik investmen*.

Wahluyo (2009) mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *reguler*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Wahluyo (2009) menjelaskan bahwa menurut golongannya, pajak terdiri menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti pajak penghasilan. Golongan lainnya yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak menurut sifatnya ada 2 yaitu pajak subjektif yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya, dan pajak objektif yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak memfokuskan pada diri wajib pajak.

Wahluyo (2009) menjelaskan juga mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan

terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Menurut Wahlujo (2009) ada beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Pajak *Statutory (statutory tax rate)*

Yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.

2. Tarif Pajak Rata-rata (*average tax rate*)

Yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan pajak (laba kena pajak).

3. Tarif Pajak Marjinal (*marginal tax rate*)

Yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.

4. Tarif Pajak Efektif

Yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Wahlujo (2009) juga menyinggung mengenai struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak ada empat. Yaitu:

1. Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Regresif

Yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

3. Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang akan semakin meningkat sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak (laba sebelum pajak).

4. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak dimana kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.3.1 Manajemen Pajak

Tidak ada seorang pun wajib pajak baik pribadi maupun badan yang senang membayar pajak. Leon Yudkin (1971) berpendapat bahwa setiap wajib pajak akan cenderung melakukan upaya-upaya seperti:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin.
2. Wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion* yaitu usaha untuk menghindari pajak secara ilegal.

Manajemen pajak merupakan cara yang biasa dilakukan oleh manajemen untuk memperkecil utang pajak perusahaannya. Pohan (2013) menjelaskan bahwa manajemen pajak sebenarnya berasal dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi), “*kalau bisa tidak membayar mengapa harus membayar, kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar*”. Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan

kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Pohan (2011) menjelaskan bahwa secara umum, tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisir beban pajak terhutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008), motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen pajak bersumber dari 3 unsur, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

2. Undang-undang perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak), karena tidak adanya undang-undang yang mengatur setiap permasalahan perpajakan secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Di Indonesia sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat, hal ini disebabkan karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Pohan (2011) juga menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen pajak ada 3, yaitu:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.1.3.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana tujuan perencanaan pajak ini adalah untuk mencapai pemenuhan kewajiban pajak yang minimum. Perencanaan pajak merupakan sebuah tindakan yang terstruktur, yang terkait dengan transaksi-transaksi yang bersinggungan dengan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah (Zain, 2006). Manfaat dari perencanaan pajak antara lain untuk menghemat kas keluar yang dikarenakan beban pajak. Menurut Abdul Rahman (2012) ada beberapa strategi umum dari perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan yaitu:

1. Penghematan Pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

2.1.3.2 Penghindaran Pajak

Hanlon and Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara *universal*, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Perilaku penghindaran pajak, secara umum didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya.

Slemrod dan Yitzhaki (2002) mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan penggelapan pajak adalah ilegalitasnya, namun ada *gray area* dimana sulit memisahkan antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Kegiatan penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan nyata untuk melawan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan, namun hanya sebatas mengurangi pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Menurut Pohan (2013, p.23) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Penghindaran pajak dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak, menurut Hoque, *et al.* (2011) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, antara lain:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam
6. industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*tax heaven countries*) (Zhou, 2011).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan jika dilakukan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan dimensi waktu dalam sebagian penghindaran pajak, yaitu beda waktu, untuk mendapatkan *time value of money*. Namun, tentunya proses yang diperlukan untuk melakukan penghindaran pajak juga membutuhkan biaya. Beberapa biaya seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain yang muncul

dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial, ataupun biaya dari kehilangan reputasi. Biaya-biaya tersebut dapat berakibat kepada turunnya nilai perusahaan. Sehingga manajemen dituntut untuk dapat mengatur maupun memperhitungkan seberapa besar manfaat yang diperoleh dari perilaku penghindaran pajak, akankah manfaat yang diperoleh akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

2.1.4 Biaya Agensi

Biaya keagenan terjadi karena adanya pemisahan atas kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, maka akan menyebabkan timbulnya kepentingan yang tidak konsisten dari pihak manajemen dan pemegang saham (Berle dan Means, 1932). Masalah agensi yang muncul antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agensi juga dapat disebut sebagai biaya oleh prinsipal untuk mengawasi kinerja dari agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan terdiri dari:

a. *The monitoring expenditures by the principle.*

Beban monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, hal ini merupakan sebuah usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui *budget restriction* dan *compensation policies*.

b. *The bonding expenditures by the agent.*

Bonding cost ini dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan

prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.

c. *The residual loss*

Residual loss merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

2.1.5 Nilai Perusahaan

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), perusahaan memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan memberikan upaya yang intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer perusahaan.

Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara maksimal apabila harga saham dari perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, 2010). Bagi perusahaan yang *go public*, nilai perusahaan ditentukan oleh permintaan dan penawaran di bursa yang tercermin dalam *listing price*. Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Namun untuk nilai perusahaan untuk perusahaan yang belum *go public*, nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain).

2.1.6 Transparansi

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Menurut Tjager dkk (2003 ; 51) Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Transparansi juga merupakan salah satu prinsip penerapan *Good Corporate Governance*, berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 dijelaskan bahwa transparansi merupakan pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh stakeholders. Dengan kata lain, prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) yang dimiliki oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian terdahulu

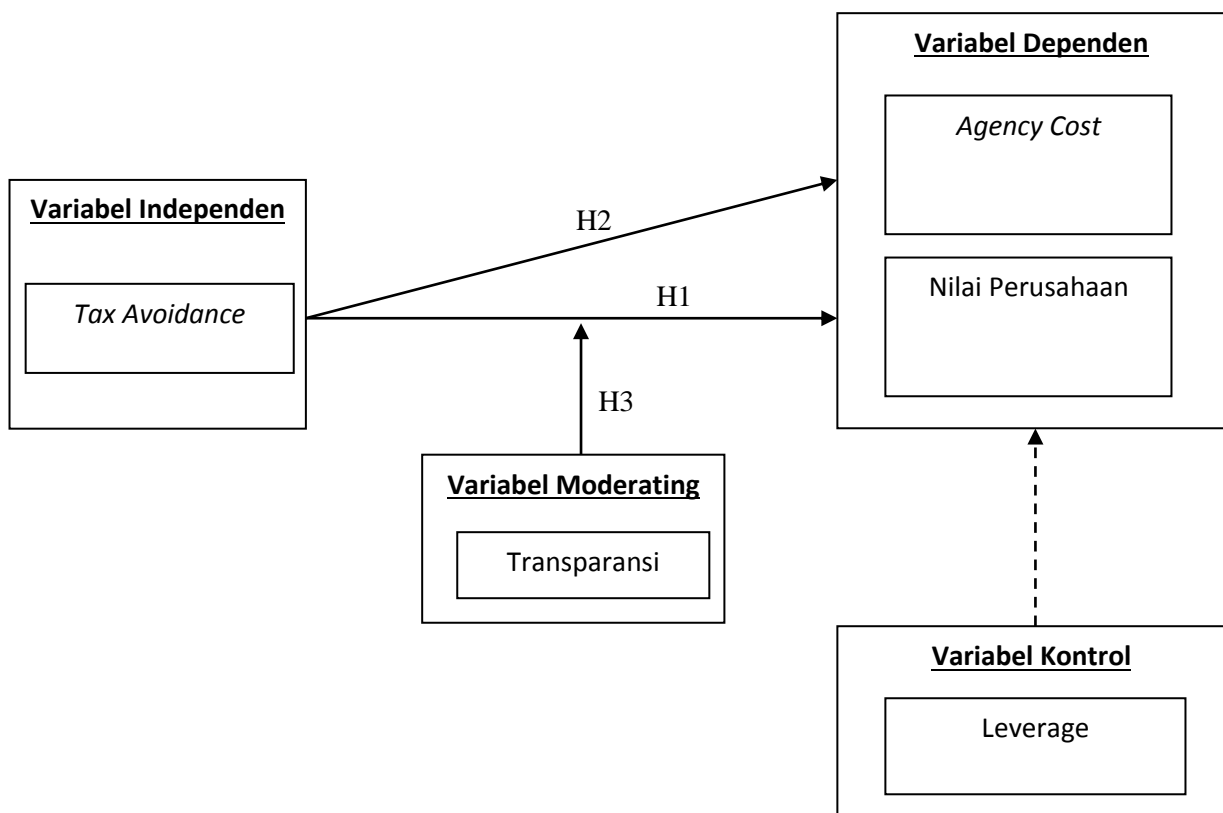
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mehir A. Desai dan Dhammika Dharmapala (2005)	Corporate Tax Avoidance and Firm Value	Secara keseluruhan, perilaku penghindaran pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil yang signifikan ditunjukkan kepada perusahaan yang berkepemilikan institusi.
2.	Scott Dyreng <i>et. Al.</i> (2005)	Long-Run Corporate Tax Avoidance	Short run tax avoidance berpengaruh positif terhadap long run tax

			avoidance
3.	Xiaohang Wang (2010)	Tax Avoidance, Corporate Transparency, and firm value.	Transparansi perusahaan memegang peranan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan
4.	Youngdeok Lim (2011)	Tax Avoidance, cost of debt and shareholder activism; evidence from korea	Tax avoidance berhubungan negatif dengan <i>cost of debt</i> .
5.	Tryas Chasbiandani dan Dwi Martani (2012)	Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan	<i>Short Run tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>long run tax avoidance</i> , dan <i>Long run tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan short run tax avoidance tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.
6.	Xudong Chen, <i>et al.</i> (2013)	Tax Avoidance and firm value: evidence from China	Transparansi dapat mengurangi pengaruh negatif dari perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Chen *et al* (2013) memiliki kelemahan yaitu tidak mengeksplorasi seberapa spesifik karakteristik dari perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menutupi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan memilih perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI sebagai sampel.

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3.1 Perumusan Hipotesis

2.3.1.1 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Perilaku penghindaran pajak dapat berpotensi memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi hutang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor. Perusahaan akan melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah agar dapat memperoleh beban pajak yang rendah. Namun perilaku tersebut tentunya akan mengurangi kandungan informasi yang disajikan, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai pada perusahaan (Chen *et al*, 2013).

Dalam penelitian Jiang *et al* (2010) menemukan hubungan antara pengaruh penghindaran pajak dapat menyebabkan hilangnya nilai perusahaan dalam jangka panjang. Chen dan Yuan (2004) menemukan bahwa beban pajak dapat dilihat sebagai indikator profitabilitas. Uraian-uraian tersebut telah menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya mengenai prakti penghindaran pajak, sehingga ditemukan hipotesis sebagai berikut:

H1. Perilaku penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

2.3.1.2 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Biaya Agensi

Perilaku penghindaran pajak merupakan latar belakang dimana munculnya konflik agensi antara perusahaan dan investor. Manajer perusahaan cenderung bertindak oportunistik untuk memenuhi kepentingan perusahaan, perilaku dari manajer tersebut tentunya akan merugikan pihak investor dimana investor memiliki kepentingan tersendiri diluar dari kepentingan manajer. Konflik agensi inilah yang menyebabkan munculnya biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh prinsipal (investor), dimana biaya agensi ini digunakan sebagai pengawasan dari pemegang saham terhadap kinerja maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Zheng *et al* (2013) menemukan bahwa peningkatan terhadap hukum, secara signifikan mengurangi biaya agensi untuk perusahaan yang tidak terdaftar dalam bursa. Dalam penelitian Chen *et al* (2013) menemukan bahwa tingginya biaya agensi mengindikasikan tingginya fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perolehan hipotesis dari penjelasan-penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H2. Perilaku penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya agensi

2.3.1.3 Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating

Transparansi dapat dikatakan sebagai ketersediaan informasi bagi pihak luar. Perusahaan yang memiliki transparansi tinggi, umumnya mendapat penilaian yang tinggi pula dari investor. Di sisi lain, transparansi membuat operasi bisnis lebih terbuka kepada pemerintah sehingga dapat melemahkan kemampuan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi merupakan variabel yang cocok untuk menguji proporsi teori agensi. Wang dan Zhang (2009) menemukan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan efisiensi kontrak dari manajer. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan informasi merupakan pedang bermata dua dimana transparansi dapat meningkatkan nilai perusahaan karena kandungan informasi yang disajikan lebih banyak, atau di sisi lain transparansi dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak. Pada dasarnya, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer akan berakibat menurunkan nilai perusahaan tersebut, namun manajer menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai pencegahan turunnya nilai perusahaan, dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, investor akan beranggapan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik karena telah mengungkapkan sebagian besar informasi yang mereka miliki, sehingga diharapkan bahwa investor akan memberikan nilai lebih pada peningkatan transparansi laporan keuangan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Oleh karena itu peneliti mengharapkan bahwa transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- H3. Transparansi memperkuat hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, variabel moderat, dan variabel kontrol, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen entah secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah perilaku penghindaran pajak dimana perilaku penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan hutang pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Untuk menentukan skor atau nilai dari perilaku penghindaran pajak perusahaan menggunakan penghitungan BTD yang juga digunakan dalam penelitian Webber (2008), dan Jackson (2009) dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{labu bersih}}{\text{Rata-rata Total Aktiva}}$$

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel utama yang diteliti, dijelaskan variabilitasnya, dan diprediksi oleh peneliti untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian menggunakan Nilai Perusahaan, dan biaya agensi.

Nilai Perusahaan diperoleh dengan rumus *Tobin's q* yang juga digunakan dalam penelitian Chen *et al* (2013) dengan rumus penghitungan:

$$\text{Tobins'Q} = \frac{MVE + DEBT}{TA}$$

Keterangan:

- MVE = Harga penutupan di akhir tahun buku x banyaknya saham biasa yang beredar
- DEBT = Utang lancar + utang jangka panjang
- TA = Nilai buku total aktiva

Variabel Dependen Kedua menggunakan biaya agensi, diperoleh dengan rumus *STA dan OETS* yang juga digunakan dalam penelitian Chen *et al* (2013) dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{STA} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

3.1.3 Variabel Moderating

Variabel moderating adalah faktor-faktor atau aspek-aspek yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai variabel moderat. Tujuannya adalah untuk melihat apakah penggunaan transparansi sebagai variabel moderating dapat memperkuat hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Pada dasarnya, transparansi merupakan salah satu kriteria dari *Good Corporate Governance*, oleh karena itu untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini digunakan item-item yang terdapat dalam *GCG Self Assesment Checklist*. Dalam *Checklist* tersebut terdapat 19 item kuesioner yang seharusnya dicantumkan perusahaan dalam laporan tahunannya. Untuk setiap item diberikan score 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan item tersebut dalam laporan tahunannya, dan score 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan item tersebut dalam laporan tahunannya. Untuk penghitungan tingkat transparansi digunakan rumus sebagai berikut:

$$Trans = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{jumlah keseluruhan item indeks}}$$

Untuk memperlihatkan peran transparansi sebagai variabel moderator, nilai yang didapatkan dalam menghitung transparansi dikalikan dengan nilai dari perilaku penghindaran pajaknya ($BTD \times Trans$)

3.1.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang pengaruhnya ingin dihilangkan atau dikendalikan, karena diduga bahwa variabel ini dapat mengacaukan penelitian (Punch, 2005). Tujuan adanya variabel kontrol adalah untuk mengurangi perbedaan yang ada diantara sampel penelitian yang akan diuji, tanpa adanya variabel kontrol akan ada perbedaan yang signifikan antar sampel yang digunakan sehingga dapat mengacaukan penelitian. Variabel kontrol yang digunakan adalah leverage dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Pemilihan sampel dimulai dari tahun 2010 karena pada tahun tersebut merupakan tahun dimulainya tarif pajak terbaru Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. Sampel dipilih dengan *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 4 tahun berturut-turut dan dapat diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

- Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan annual report, serta terdapat laporan bukti audit.
- Merupakan Perusahaan-perusahaan manufaktur.
- Laporan disajikan dengan mata uang rupiah.
- Laporan keuangan diterbitkan tanggal 31 Desember.
- Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder yaitu dengan melakukan dokumentasi atas informasi yang dibutuhkan. Sumber data berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada periode tahun 2010-2013 serta tambahan informasi dari website resmi perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh daftar semua perusahaan non-keuangan selama periode tahun 2010-2013 dari *IDX Fact Book* tahun 2010-2013, kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif menghasilkan deskripsi dari data yang digunakan, sehingga menjadikan informasi lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai yang sering muncul (*modus*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2012). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu dapat menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum analisis regresi dilakukan, harus dilakukan uji asumsi klasik untuk menentukan apakah model dari regresi tersebut memenuhi syarat-syarat untuk lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk

menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik, dimana dasar dari pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2012).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan menggunakan uji statistik non parameterik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). jika hasil uji tersebut menunjukkan signifikansi diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Namun jika nilai signifikansi dari uji *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2012).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai, ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Seharusnya dalam model regresi, variabel-variabel bebas tidak saling berkorelasi satu sama lainnya atau tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol (Ghozali, 2012).

Dalam model regresi, penentuan ada tidaknya multikolinearitas terhadap variabel independennya dapat dilihat dari *tolerance value*, dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance value* menunjukkan variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya, sedangkan nilai VIF diperoleh dari perhitungan $1/\textit{tolerance}$ sehingga jika *tolerance value* menunjukkan nilai yang rendah, maka VIF akan menunjukkan nilai yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $<0,10$ untuk *tolerance value* dan $\text{VIF}>10$ (Ghozali, 2012)

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Ghozali (2012) menjelaskan bahwa autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, masalah ini timbul karena residual yang tidak bebas antara satu observasi ke observasi lainnya.

Untuk menentukan adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, dapat menggunakan Uji *Durbin-Watson* (*DW test*), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai dari Uji DW dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Autokorelasi

H0	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < DW < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_L \leq DW \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < DW < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tolak	$d_U < DW < 4 - d_L$

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model yang baik, tidak terdapat Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2012).

Untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,

maka diidentifikasi tidak terdapat Heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Selain menggunakan grafik *scatterplot* dapat digunakan juga uji glejser, dimana dalam uji gleser ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilitas. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (Ghozali, 2012).

Dalam penelitian ini ada 3 model analisis regresi yang dipakai, adalah sebagai berikut:

Model 1 : Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

$$q_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Tax Avoid_{i,t} + Leverage_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (1)$$

Model 2 : Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 2 yaitu menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya agensi.

$$Agency Cost_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Tax Avoid_{i,t} + Leverage_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (2)$$

Model 3 : Model ini digunakan untuk menguji hipotesis 3 yaitu menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang transparan

$$q_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Tax\ Avoid_{i,t} + \alpha_2 Trans_{i,t} + \alpha_3 (Tax\ Avoid_{i,t} * Trans_{i,t}) + Leverage_{i,t} + \varepsilon_{i,t.(3)} \dots \dots \dots (3)$$

3.5.4 Uji Hipotesis

Secara statistik, setidaknya *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai uji statistik F dan nilai uji statistik t.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen (variabel bebas) yang dimasukkan dalam model regresi dapat mempengaruhi variabel dependennya. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F dari tabel dengan F yang dihitung. Jika nilai F-tabel < F-hitung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut dapat diterima dan layak digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan signifikansi sebesar 5%, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel independen harus memiliki tingkat signifikansi <0,05 agar dapat dilanjutkan ke tahap pengujian statistik t (Ghozali, 2012).

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel independennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai dari koefisien determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan dari variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2012).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Beberapa peneliti menggunakan nilai *adjusted R^2* sebagai alternatif akan kelemahan tersebut. Nilai dari *adjusted R^2* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali,2012), sehingga nilai *adjusted R^2* yang negatif tersebut dianggap bernilai nol.

3.5.4.3 Uji statistik t

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2012). Apabila t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan, atau hipotesis dapat diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel maka t hitung tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Signifikansi yang

digunakan adalah 5%, hal ini berarti bahwa jika nilai $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak, apabila $t < 0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali,2012).